



Kemenag Awasi Struktur Bangunan 36 Pesantren

YOGYA, TRIBUN - Perhatian publik terhadap keamanan dan kelayakan struktur bangunan di lingkungan pendidikan, khususnya pondok pesantren, belakangan meningkat. Merespons hal tersebut, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta melakukan pengawasan dan inventarisasi sarana prasarana seluruh pesantren yang terdaftar. Kepala Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Ahmad Shidqi menyatakan bahwa saat ini terdapat 36 pesantren yang telah terdaftar secara resmi di wilayahnya. Langkah pengawasan pun diambil untuk memastikan kenyamanan dan

keamanan para santri dalam menempuh proses belajar mengajar. "Semua pesantren di Kota Yoga ini sudah terdaftar. Kalaupun ada ataupun belum terdaftar, itu sudah dalam proses perizinan. Semua (36 pesantren) sudah berizin," katanya, Jumat (17/10). Proses perizinan ini, lanjutnya, mencakup prosedur yang ketat, termasuk peninjauan jumlah santri serta sarana dan prasarana penunjangnya. Terkait kekhawatiran publik mengenai struktur bangunan, terutama setelah insiden di daerah lain, Kemenag Kota Yogyakarta menegaskan telah memulai langkah antisipasi.

"Kami monitoring dan inventarisir keberadaan masing-masing sarana prasarana yang ada di seluruh pesantren," ujar Shidqi. Ia pun menegaskan komitmennya untuk menggali data yang benar-benar akurat, demi menjamin keamanan seluruh santri di Kota Yogyakarta. Meski saat ini baru pada tahap pemantauan dan inventarisasi, Kemenag tidak menutup kemungkinan bakal menjalin kerja sama dengan instansi terkait. "Sehingga sarana prasarana yang ada di pesantren dalam mendukung proses pembelajaran bisa dirasakan

kenyamanannya dan keamanannya oleh para santri," tambahnya. Shidqi optimistis, rata-rata struktur bangunan di Kota Yogyakarta, termasuk pesantren, telah memiliki pertimbangan ketahanan terhadap gempa. Bukan tanpa alasan, Yogyakarta punya pengalaman dilanda gempa bumi dahsyat pada 2006 silam, sehingga diyakini tidak akan main-main dengan struktur bangunan. "Struktur bangunan yang ada di Yoga ini rata-rata sudah mempertimbangkan berbagai hal. Artinya, dalam membangun, masyarakat ini memperhatikan kekuatan, disesuaikan

dengan kondisi wilayah yang rawan gempa," paparnya. Menurutnya, bangunan yang sudah berdiri sejak sebelum gempa 2006 dan masih kokoh hingga kini, dapat dipastikan konstruksinya sudah teruji. Sementara bangunan-bangunan baru, yang didirikan setelah kejadian bencana alam itu pun umumnya sudah memenuhi persyaratan konstruksi tahan gempa. "Tapi, ini tetap kita pastikan lagi, bagaimana kondisi terkini, khususnya terkait pesantren. Ini dalam proses pemantauan dan menginventarisir," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005